

RANCANGAN

CATATAN RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Selasa, 5 Juni 2018.
Waktu : Pukul 10.15 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, H. Desmond Junaidi Mahesa, SH.,M.H. dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L 2019
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan realisasi yang telah berjalan anggaran 2018 di Kejaksaan Agung
 - Meminta penjelasan terkait renstra kejaksaan agung, dimana disusun untuk 5 tahun, seharusnya tahapan tahapan renstra kejaksaan di akomodir oleh pemerintah cq Kemenkeu
 - Meminta penjelasan terkait dengan kejaksaan kekurangan anggaran Rp. 2,4 trilyun, kejaksaan di daerah masih kekurangan anggaran untuk pidsus dan pidum
 - Meminta penjelasan terkait dengan perlunya Kejaksaan Agung membangun sistem berbasis IT
 - Menyampaikan bahwa sarpras kejaksaan di daerah masih minim, mendukung pembangunan 7 Kejari terutama untuk daerah terpencil.

- Meminta penjelasan terkait dengan sampai sejauhmana kebutuhan anggaran 3,6 trilyun yang diusulkan Kejaksaan Agung, apa urgensinya. Apabila hal ini tidak disetujui apa akibatnya bagi Kejaksaan Agung, apa saja kekurangannya. Perlu adanya dukungan penambahan atase Kejaksaan terutama untuk Negara yang banyak TKI untuk membela hak-hak para TKI. Diperlukan perhatian untuk kejaksaan di daerah terutama daerah terpencil sehingga perlu mendapat tunjangan lebih
- Pda dasarnya dapat menerima usulan Kejaksaan Agung, namun untuk poin 8 dan 9 dalam bahan yang disampaikan ini masih perlu diberikan masukan secara tertutup.
- Perlu diperbaiki pola penyusunan anggaran, mesti dilihat mana program kegiatan yang memerlukan perhatian lebih (money follow program), lebih baik pagu indikatif yang akan disampaikan dalam nota keuangan di sampaikan ke Komisi III. Kedepannya perlu dilakukan exercise agar pengurangan anggaran tersebut tidak mengganggu kinerja Kejagung.
- Meminta penjelasan terkait dengan soal barang rampasan, berapa hasil pengembalian kerugian kepada Negara, bahwa tgl 18 Mei 2018 ada pengembalian kerugian uang Negara dalam bentuk uang cash , berharap hal ini tidak terulang.
- Meminta penjelasan terkait dengan anggaran kejaksaan dibanding kepolisian dimana kepolisian mencapai Rp.83 trilyun, sedangkan kejaksaan hanya 1 digit, seharusnya anggaran kejaksaan mencapai paling tidak Rp.40 trilyun.
- Meminta penjelasan terkait dengan beberapa proses pembangunan sarpras Kejaksaan di daerah yang belum dibangun.
- Meminta penjelasan terkait dengan pengadaan senjata untuk aparat kejaksaan.
- Meminta penjelasan terkait dengan anggaran kejaksaan yang menurun, apakah karena kemampuan fiskal negara yang sedang buruk atau memang karena tingkat serapan kejaksaan yang rendah.
- Bahwa sebagai unsur criminal justice system seharusnya anggaran kejaksaan tidak beda jauh dengan kepolisian.
- Meminta penjelasan terkait dengan tidak adanya program penanganan sengketa pemilu, mengingat mendekati tahun 2019.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan surat Jaksa Agung RI Nomor : B- 002/A/Cr.2/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 Perihal Kebutuhan Anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019, Kejaksaan RI mengajukan usul kebutuhan anggaran Kejaksaan RI TA 2019 sebesar Rp. 9.572.549.684.000,- (*sembilan triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dengan perincian per Program sebagai berikut :

No.	Program	Kebutuhan TA 2019
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Rp.4.276.121.606.000-

2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Rp.3.653.151.969.000,-
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Rp.29.637.968.000,-
4.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Rp.180.200.000.000,-
5.	Program Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Rp.280.628.723.000,-
6.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Rp.642.395.809.000,-
7.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rp.476.125.379.000,-
8.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp.34.288.230.000,-
	Jumlah	Rp.9.572.549.684.000,-

- Berdasarkan surat Jaksa Agung RI Nomor : B- 038/A/Cr.2/01/2018 tanggal 07 Maret 2018 Perihal Penyampaian Usulan Tambahan Kebutuhan Anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019, yang pada intinya Kejaksaan RI untuk Tahun Anggaran 2019 mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp.194.629.184.000,- (*seratus sembilan puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dengan perincian per Program sebagai berikut :

No.	Program	Kebutuhan TA 2019
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Rp.98.916.043.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	-
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	-
4.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Rp.16.090.337.000,-
5.	Program Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Rp.68.542.897.000,-
6.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	-
7.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rp.440.637.000,-

8.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp.10.639.270.000,-
	Jumlah	Rp.194.629.184.000,-

- Dengan demikian usulan anggaran Kejaksaan RI tahun anggaran 2019 yang semula Rp.9.572.549.684.000,- (*sembilan triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) menjadi **Rp. 9.767.178.868.000,-** (*sembilan triliun tujuh ratus enam puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- Adapun anggaran sebesar Rp. 9.767.178.868.000,- (*sembilan triliun tujuh ratus enam puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) akan digunakan untuk membiayai 8 (delapan) program sebagai berikut :

No.	Program	Kebutuhan TA 2019
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Rp.4.375.037.649.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Rp.3.653.151.969.000,-
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	Rp.29.637.968.000,-
4.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Rp.196.290.337.000,-
5.	Program Penyelidikan/ Pengamanan /Penggalian Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Rp.349.171.620.000,-
6.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Rp.642.395.809.000,-
7.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rp.476.566.016.000,-
8.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp.44.927.500.000,-
	Jumlah	Rp. 9.767.178.868.000,-

- Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan RI Nomor : S-269/MK.02/2018 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : B-209/M.PPN/D.8/KU.01.01/ 04/2018 tanggal 16 April 2018 hal Pagu Indikatif K/L Tahun 2019, bahwa Kejaksaan RI dalam TA 2019 memperoleh pagu indikatif sebesar **Rp. 6.146.271.982.000,-** (*enam triliun seratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) yang jika dibandingkan dengan Pagu anggaran TA 2018

mengalami penurunan anggaran sebesar **Rp. 240.333.693.000,-** (*dua ratus empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) dengan perincian jenis belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu 2018	Pagu Indikatif 2019	Selisih (+/-)
1.	Belanja Operasional Pegawai	2.889.983.000.00 0	2.790.749.318.00 0	99.233.682.000
2.	Belanja Operasional Barang	737.219.645.000	688.657.018.000	48.562.627.000
3.	Belanja Barang Non Operasional	2.759.403.030.00 0	2.666.865.646.00 0	92.537.384.000
	Jumlah	6.386.605.675.00 0	6.146.271.982.00 0	240.333.693.00 0

➤ Dengan Pagu Indikatif TA 2019 sebesar **Rp. 6.146.271.982.000,-** (*enam triliun seratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) anggaran yang dapat disusun per Program adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

PROGRAM	OPERASIONAL		BELANJA NON OPERASIONAL	JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	2.760.379.418	709.104.813	229.354.909	3.698.839.140
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI			1.499.663.344	1.499.663.344
Pengawasan dan Peningkatan		1.256.678	30.625.808	31.882.486

n Akuntabilit as Aparatur Kejaksaan RI				
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	30.369.900	22.638.963	31.223.881	84.232.744
Program Penyelidika n/ Pengaman an /Penggalan gan Permasala han Hukum di Bidang IPOLEKSO SBUD Hukum dan Hankam		1.739.324	77.197.038	78.936.362
Program Penangana n dan Penyelesai an Perkara Pidana Umum		1.187.481	504.163.231	505.350.712
Program Penangana n dan Penyelesai an Perkara Pidana Khusus, Pelanggara n Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi		1.497.416	228.267.196	229.764.612
Program Penangana n dan Penyelesai			17.602.582	17.602.582

an Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara				
JUMLAH	2.790.749.318	737.424.675	2.618.097.989	6.146.271.982

- Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Jaksa Agung Muda Pembinaan – Kejaksaan Agung RI, telah dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) antara Kejaksaan RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan yang membahas Pagu Indikatif Kejaksaan RI TA 2019 dan Proyek Prioritas Nasional. Pada pembahasan tersebut, telah kami sampaikan bahwa Pagu Indikatif Kejaksaan RI TA 2019 sebesar **Rp. 6.146.271.982.000,-** (*enam triliun seratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), belum dapat mencukupi untuk membiayai kebutuhan riil seluruh Program Kejaksaan RI tahun 2019 terutama belanja operasional pegawai yang mengalami kenaikan grade tunjangan Kinerja (remunerasi) berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/275/M.SM.04.00/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Setelah dilakukan pembahasan pada pertemuan *Trilateral Meeting* tersebut, telah dibahas antara lain :
1. Proyek Prioritas Nasional Kejaksaan RI yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 terdapat pada 4 Program Kejaksaan RI dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 163.331.728.000,-** (*seratus enam puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*)
 2. Prioritas Bidang Kejaksaan RI yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 terdapat pada pada 5 Program Kejaksaan RI dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 659.839.000.000,-** (*enam ratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta ribu rupiah*)
- Beberapa hal lainnya yang disampaikan oleh Jaksa Agung, diantaranya sebagai berikut:
- Bahwa Kejaksaan mendapatkan predikat WTP dari BPK
 - Bahwa Jaksa Agung Muda Pembinaan yang sangat mengetahui secara rinci tentang anggaran di Kejaksaan Agung
 - Kejaksaan masih menunggu ijin pembangunan 7 kantor baru kejaksaan tinggi dari Presiden.
 - Presiden telah menyetujui pembangunan gedung baru di Kejaksaan Agung senilai Rp.96 Milyar lebih untuk kantor PPA
 - Di Pekanbaru dan Riau akan di bangun kantor Kejati baru dengan bantuan dari pemda setempat
 - PNBP sampai 31 Mei 2018 sebesar 587 Milyar lebih dari target 359 Milyar lebih
 - TP4D mendampingi proyek jalan tol, pelabuhan, bandara dan pembangunan venue Asian games

- Terkait pengembalian uang dari Sdr.Samadikun Hartono, bahwa Kejaksaan Agung menerima pengembalian dalam bentuk uang tunai dari Sdr.Samadikun Hartono.
- Jaksa Agung meminta dukungan Komisi III DPR RI agar pagu indikatif yang turun bisa di upayakan mendekati anggaran yang semula untuk memenuhi kebutuhan Kejagung
- Menyampaikan pentingnya penambahan anggaran untuk atase karena sangat bermanfaat bagi TKI
- Membuat kegiatan Wilayah Bebas Korupsi untuk kejaksaan-kejaksaan di daerah
- Anggaran yang disetujui tidak harus dibagi rata melainkan disesuaikan dengan kegiatan masing masing program
- Kejaksaan akan melakukan exercise dengan dukungan dari Komisi III DPR RI
- Bahwa Sdr.Syamsul Nursalim telah mengembalikan Rp. 1,3 Trilyun melalui transfer bank
- Bahwa Kejaksaan Agung pernah mendapat penghargaan oleh Menteri Keuangan terkait pengelolaan anggaran sehingga tidak karena serapan yang rendah
- Bahwa penguatan Kejaksaan tidak hanya anggaran

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi III DPR RI dapat memahami penjelasan Jaksa Agung RI atas Pagu Indikatif tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp. 6.146.271.982.000,- beserta usulan tambahan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung RI sebesar Rp. 3.825.566.050.699,- Untuk selanjutnya Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk menyajikan rencana program kerja yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam rapat kerja. Selanjutnya Komisi III DPR RI akan mempelajari secara teliti pagu usulan Kejaksaan Agung RI sebesar Rp 9.767.178.868.000,- dan akan diputuskan dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

